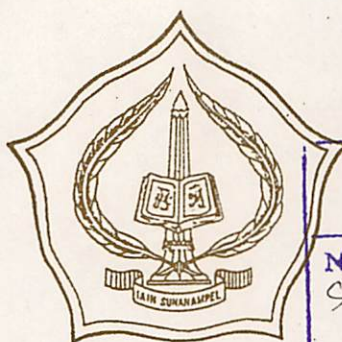


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP USAHA JASA EKSPEDISI
PT. CITRA CIPTA MADINA
DI KODYA SURABAYA**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



Oleh

AGUNG PRISTIONO
NRP. 011932326

Dosen Pembimbing
Drs. H. Saptan

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1995

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
N. KLAS S-1995	N. REG 8/1995/MJ/20
020	ASAL BUKU :
MJ	TANGGAL :

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 17 Juni 1995

HAL : Persetujuan munaqasah skripsi.

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel di Surabaya.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : AGUNG PRISTIONO

Nrp : 011932336

Jurusan : Mu'amalah Jinayah


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA
EKSPEDISI PT. CITRA CIPTA MADINA DI KODYA
SURABAYA.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami mengharapkan agar segera dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War.Wab.

Pembimbing


Drs. H. Saparlan
NIP : 150013213



NOTA PEMBIMBING

HAL : Perbaikan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Surabaya IAIN
Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum War.Wab.

Setelah Kami baca dan teliti kembali nas
kah skripsi saudara :

Nama : Agung Pristiono
Nrp : 011932326
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha -
Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madina
di Kotamadya Surabaya.

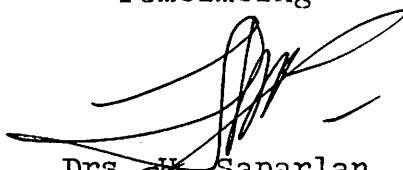
ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan -
Keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada -
tanggal 17 Juli 1995.

Dengan demikian, Kami harap agar dapat segera di-
sahkan sebagaimana mestinya.

Atas perha tian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War.Wab.

Pembimbing



Drs. H. Saperlan
Nip. 150013213

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARIAH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian
Munagasah Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada :

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah sa-
tu syarat ujian akhir program strata (S1) guna memperoleh gelar
sarjana Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada Fakultas Syariah IAIN -
Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqa-
sah diatas.

Surabaya, 17 Juli 1995



Drs. H. Kuslan, MA
Nip. 15001543

Sidang Ujian Munagasah :

Ketua sidang/penguji,

Drs. H. Kuslan, MA
Nip. 15001543

Penguji,

Drs. H. Dar Halimi
Nip. 030071344

Sekretaris/penguji

Drs. Masruhan M Ag
Nip. 15023849

Pembimbing,

Drs. H. Saparlan
Nip. 150013213

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iv
Pengantar Wacana	v
Daftar Isi	viii

BAB I : Pendahuluan

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Identifikasi Masalah	4
C.Pembatasan Masalah	4
D.Perumusan Masalah	4
E.Tujuan Studi	5
F.Kegunaan Studi	5
G.Data-data yang akan dihimpun	5
H.Sumber Data dan Teknik Penggaliannya	6
I.Metode Analisa Data	7

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG USAHA JASA EKSPEDISI MENURUT ISLAM

A.Dasar Hukum dan Pengertian Usaha Jasa Ekspedisi menurut Islam	9
B.Unsur-unsur didalam Ijarah yang dikaitkan dengan Usaha Jasa Ekspedisi	20
C.Penyelesaian kasus bila ada yang menyalahi janji didalam transaksi sewa-menyewa Usaha Jasa Ekspedisi	25

BAB III : DESKRIPSI USAHA JASA EKSPEDISI PT. CITRA CIPTA MADINA (PT. CCM) DI KOTAMADYA SURABAYA

A.Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Dalam Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM di Kotamadya Surabaya.....	28
---	----

B.Unsur-unsur yang terdapat dalam usaha jasa ekspedisi PT. CCM di Kotamadya Surabaya.....	31
C.Pelaksanaan Usaha Jasa ekspedisi PT.Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya.....	40
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA EKSPE DISI PT.CITRA CIPTA MADINA DI KODYA SURABAYA	
A.Tinjauan Hukum Islam dari segi Hukum dalam - Usaha Jasa Ekspedisi PT.CCM di Kodya Surabaya..	57
B.Tinjauan Hukum Islam terhadap Unsur-unsur yang terdapat dalam Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM di Kotamadya Surabaya.....	60
C.Tinjauan Hukum Islam dari segi Pelaksanaan Usaha Jasa Ekspedisi PT.CCM di Kodya Surabaya....	64
BAB V : PENUTUP	
A.Simpulan	67
B.Saran-saran	68
C.Lampiran-lampiran	69
BIBLIOGRAFI	70

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur berbagi aspek kehidupan secara menyeluruh dari tata cara beribadah kepada Allah SWT, maupun hidup bermasyarakat secara luas. Segalanya ada aturan dan ketentuannya.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, dan bertolong - tolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Q.S. ayat 5 Al-Maidah).

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka usaha jasa ekspedisi termasuk salah satu diantaranya. Didalam kitab fiqih usaha jasa ekspedisi merupakan pembahasan dalam suatu bagian disebut dalam Kitab Ijarah. Usaha jasa ekspedisi sebagai bentuk suatu persetujuan dalam muamalah telah tersebar luas dan dipraktikkan dimana-mana, - yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial-modern sekarang, dalam rangka membantu balancaran serta kebutuhan baik perseorangan maupun perusahaan.

Salah satu diantara sekian banyak perusahaan yang menyangkut bidang usaha jasa ekspedisi adalah PT. Citra Cipta-Madina di Kotamadya Surabaya. Dimana perusahaan tersebut mencakup usaha jasa ekspedisi darat, laut dan udara.

PT. CCM yang bergerak dibidang usaha jasa ekspedisi sebagai arsitek transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mata rantai gerak arus barang-barang dari satu tempat ke tempat tujuan.

Tidak ada perdagangan tanpa transportasi, karena dagang adalah berarti pengalihan hak milik atas barang-barang. Maka peranan transportasi atau pengangkutan dalam perdagangan memungkinkan bagi si pembeli dapat menerima barang-barangnya yang dibeli akan lebih tepat dan terjamin. (Ekspedisi muatan-Sukrisman Drs. 1985).

Ekspediteur dalam bahasa Inggrisnya disebut " Cargo for warder " dinyatakan sebagai subjek perjanjian pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim, atau pengangkutan, atau penerima. Walaupun ia bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Ekspediteur berfungsi sebagai "perantara" dalam perjanjian pengangkutan, diatur dalam buku I bab V bagian 2 pasal 86 s.d. 90 K U H D.

Menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, Ekspediteur adalah Orang yang pekerjaannya mencari pengangkut barang di darat atau perairan bagi pengirim, ekspediteur adalah yang mengangkat diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengangkat diri untuk bayar provisi kepada ekspediteur.

Kenyataan ekspediteur hanya mencari pengangkut bagi pengirim. Ekspediteur bukan pengangkut. Apabila ia membuat per

janjian pengangkutan dengan pengangkut, ia bertindak atas nama pengirim.

Pengirim sebagai pemberi kuasa memberi perintah kepada ekspediter yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh ekspediter. Termasuk tugas ekspediter ialah menerima barang-barang dari pengangkut yang selanjutnya diserahkan kepada penerima, yang pada umumnya bukan si pengirim. Biasanya si penerima adalah pihak pembeli dalam perjanjian jual-beli yang dibuatnya lebih dulu, sedangkan si pengirim adalah si penjual. (H.M.N. Purwosutjipto, SH. 1991).

Seperti telah diuraikan diatas, aktivitas jasa ekspedisi (Freigh Forwarding) ada dalam lingkup (scope) tata-niaga secara struktural dan mekanisme perdagangan secara operasional. Di dalam prakteknya banyak sekali kejanggalan dan penyimpangan yang terdapat di dalam peristiwa pengiriman barang antara lain masalah teknik pencarteran armada, pencampuran barang atau kombine dan lain sebagainya.

Atas dasar anggapan tersebut diatas, maka perlu adanya pembahsan lebih lanjut. Khususnya bila ditinjau dari kaca mata Hukum Islam apakah ada di dalam praktek usaha jasa ekspedisi terdapat penyimpangan atau tidak.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : " Tinjauan Hukum Islam terhadap usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya ".

C. Pembatasan Masalah

Masalah usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya yang ditinjau dari Hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak, sehingga dalam penelitiannya , akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak tenaga, maka dalam penulisannya memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan - ini akan dibatasi pada :

1. Pelaku (subjek) : PT.Citra Cipta Madina (ekspediteur)
- 2.. Alat pengangkut : Alat yang digunakan untuk pengiriman
- 3.. Barang (objek) : Muatan yang diangkut oleh ekspediteur

D. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah dalam pernyataan diatas, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1). Bagaimanakah deskripsi usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya ?
- 2). Apakah unsur-unsur yang urgent dalam peristiwa pengiriman barang yang terdapat dalam usaha jasa ekspedisi PT. - Citra Cipta Madina ?
- 3). Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap "Usaha jasa - ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas maka tujuan studi adalah :

- 1). Untuk mendapatkan pengertian secara luas dari praktek-
"Usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina" di Kota
madya Surabaya.
- 2). Untuk mengetahui serta menetapkan apakah pelaksanaan -
praktek usaha jasa ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di
Kotamadya Surabaya tersebut sesuai dengan aturan Islam
atau tidak.

F. Kegunaan Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil Studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-ku
rangnya untuk :

- 1). Studi Ilmiah, yakni kepentingan penelitian yang seje
nis ini untuk masa berikutnya.
- 2). Kepentingan terapan, yakni berguna untuk menjawab dan
mengatasi kasus yang mungkin timbul dan berkembang di
masyarakat sehubungan dengan praktek usaha jasa ekspe
disi.

G. Data-data yang akan dihimpun

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara -
global terdiri atas :

- 1). Hasil penelitian para ilmuwan(sarjana Hukum) yang berkaitan dengan masalah Hukum pengangkutan (ekspedisi).
- 2).. Pandangan serta pendapat para ulama' terhadap praktek usaha jasa ekspedisi dari segi hukum Islam, (ijarah).
- 3). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang hal-hal - berhubungan dengan sewa-menyewa (Ijarah).

H.. Sumber data dan Teknik Penggaliannya

Kaitannya dengan jenis-jenis data global diatas maka sumber data yang penulis pergunakan disini adalah; Buku buku pustaka, kitab-kitab dan seterusnya sepanjang ada relevansinya dengan topik pembahasan. Sedang teknik penggalian-nya adalah penelitian lapangan dengan cara mengamati segala aktifitas peristiwa pengangkutan dan wawancara (interview) - dengan karyawan ekspedisi serta mengambil dasar-dasar pemikiran para ilmuwan dan para ulama' untuk kami inventarisir-sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun buku-buku yang dijadikan standar dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1). Hukum Pengangkutan di Indonesia oleh, Sution Usman Adji SH; Djoko Prakoso,SH; dan Hari Pramono.
- 2). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan) oleh, H.M.N. Purwosutjipto,SH.
- 3).. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara oleh, Abdulka dir Muham mad, SH.
- 4).. Ekspedisi Muatan (Freigh Forwarder) oleh, Drs. Sukrisman

- 5). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran laut dan perairan darat) oleh, H.M.N.Purwosujtipto,SH
- 6). Hukum perdata Indonesia oleh Abdulkadir Muhammad,SH.
- 7). Pokok-pokok Hukum Perdata oleh, Prof. Subekti, SH.
- 8). Asas-Asas Hukum Perdata Internasional oleh, Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH.
- 9). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh, Prof,R. Subekti S.H. dan R. Tjitrosudibjo.
- 10).Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah,Syirkah oleh, Ahmad - Azhar Basyir MA.
- 11).Kode Etik Dagang menurut Islam oleh, DR. H.Hamzah Ya'qub
- 12).Tarjamah Bulughul Maram oleh A. Hasan.

I. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa ditempuh pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan maksud memberi pemahaman dengan penyajian data yang teliti dan akurat, agar dapat mempertegas hipotesa, memperkuat teori yang telah ada atau menyusun teori-teori baru. Adapun metoda yang dipergunakan adalah :

- 1). Induktif, Yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan - yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum.
- 2). Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori dalil-dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya, diemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

- 3). Deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan atau menggambarakan pemikiran yang telah ada atau menjelaskan apa adanya (obyektif).
- 4). Interview, yaitu Cara untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif dengan wawancara kepada personil yang berhubungan dengan suatu masalah yang akan diteliti.
- 5). Komparatif, yaitu Dikemukakan perbandingan beberapa pendapat para ahli dalam suatu masalah dan kemudian dari beberapa pendapat tersebut dapat dipakai pendapat yang berdasarkan argumentasi yang lebih kuat dan meyakinkan.

B A B II

LANDASAN TEORI TENTANG USAHA JASA EKSPEDISI MENURUT ISLAM

A. Dasar Hukum dan Pengertian Usaha Jasa Ekspedisi Menurut ISLAM

1. Sejarah singkat asal mula usaha jasa ekspedisi pada awal perkembangan Islam

Usaha Jasa ekspedisi secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk aspek kerja sama dan perhubungan manusia (mua'malah) yang ada sejak manusia mengenal alat transportasi misalnya, Kuda, onta, keledai dan sebagainya.

Sewaktu Nabi Muhammad SAW. belum diangkat menjadi nabi beliau sering mengikuti pamannya Abu Thalib membawa barang dagangan ke Syam, yang tergabung dalam suatu rombongan atau kafilah - membawa barang dagangan tersebut.

Dan ketika beliau mengenal Siti Khodijah, seorang saudagar kaya pada waktu itu. Muhammad SAW. telah mendapat kepercayaan - atau amanah membawa dan menjualkan barang dagangan milik Siti Khodijah dalam suatu rombongan atau kafilah.

Rombongan atau kafilah yang membawa barang dagangan tersebut adalah merupakan bentuk usaha jasa ekspedisi yang dilakukan dan meskipun berupa transportasi yang sederhana.

2. Dasar Hukum dan Pengertian Usaha Jasa Ekspedisi

Telah menjadi Sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, tolong-menolong dan bertolong-tolongan - antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermua lah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Penyataan ini tak dapat dipungkiri, yang lebih jauh diterangkan dalam pengetahuan sosiologi. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang menentangkannya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini.

Diterangkan dalam Al-Qur'an :

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس...

Artinya : "Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada kecuali mereka berpegang kepada tali Allah dan berbungan dengan sesama manusia... (Q.S. Ali Imron:112)
(Al Qur'an dan terjemahan Depag)

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam sewa-menyewa (ijarah) adalah sebagai berikut :

قالت احدهما يا ابي استأجره ان خير من استأجرت القوي الريمين
قال اني اريد ان انكح احدي ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانى حجج²
فان اتكمت عشرا من عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان
شاء الله من الصالحين (القلم: ٢٦ - ٢٧)

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ba-
pakku, terimalah ia sebagai orang yang bekerja (pa-
da kita), karena sesungguhnya orang yang paling ba-
ik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang
kuat dan terpercaya. Berkatalah dia (Syu'aib) : Se-
sungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan -
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bah-
wa engkau bekerja denganku selama delapan tahun, dan
jika engkau cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah
(sukarela) dari engkau sendiri. Aku tidak bermaksud
memberati engkau, dan insya Allah, engkau akan men-
dapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Q.S. al -
Baqarah : 26-27 / Al-urhan dan terjemahnya DEPAG).

Pada ayat lain dikemukakan :

فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن ... (الطلاق : ٦)

Artinya : "Jika mereka menyusukan (anak-anak kalian) untuk ka-
lian maka bayarlah upahnya." (QS. At Thalaq: 6)

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما
أتيتم به المعروف ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan o-
leh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apa
bila kalian memberikan pembayaran menurut yang pa-
tut." (QS. al Baqarah : 233)

Sementara menurut Sunnah, ada diriwayatkan dari Aisyah ra. :

استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدئل هاديا خبيثا،
وهو علي بن كفار قرشي، فدفعنا إليهما رحلتيهما ووعده غار ثور
بعد ثلاث ليال. رواه البخاري

Artinya : "Dari Aisyah ra. tentang hadits hijrah - ia berkata:

Nabi Muhammad SAW. bersama Abu bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu ia menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikan untuk bertemu di gua Tsaur. Sesudah tiga malam si laki-laki itu kemudian datang pada mereka dengan membawa kendaraan itu, lalu mereka pergi (menuju Madinah)." (DR. H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 319)

Banyak Hadits Nabi yang memberi keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian sewa-menyewa, yang berarti sewa-menyewa merupakan perjanjian yang dibenarkan hukum Islam.

"Pada suatu ketika Nabi melakukan cantuk (berbekam) - dan beliau berikan upahnya kepada yang membekam (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas)."

Lebih lanjut Al-qur'an menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan alat transportasi baik di darat maupun di atas lautan sesuai dengan firman-Nya :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الْإِسْرَاءُ : ٧٠)

Artinya : " Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak - Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan. " (Q.S. Al-Israa' : 70)

Sedangkan Hadits Nabi tentang sewa-menyewa diriwayatkan Ibnu Majah, beliau bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya : " Bayarlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering. " (H.R. Ibnu Majah)

Dan Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi bersabda :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya : " Allah 'azza wajalla berfirman : Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat yaitu, orang yang berjanji dengan (nama) KU, kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak bayar gajinya. " (H.R. Muslim)

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotongroyongan sebagaimana ditandaskan dalam Al-Qur'an :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ٢)

Artinya : "Bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan." (Q.S.alMaidah ayat :2).

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan dan ekspedisi termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting perananya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Orang-orang kota membutuhkan hasil pertanian orang-orang desa dan sebaliknya orang-orang desa membutuhkan barang-barang produksi industri orang-orang kota. Kaum nelayan perlu menukar ikannya dengan beras dan kaum petani perlu menukar pangannya dengan sandang.

Pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun dengan menggunakan alat pembayaran (mata uang), dapat terlaksana disuatu pasar atau toko melalui aktifitas perdagangan pemasaran, perhubungan, angkutan dan sebagainya.

Dalam melakukan kegiatan itu, dilaksanakan umum menurut kebutuhan dan ada pula yang dilaksanakan secara khusus, sehingga menjadi profesi selaku pedagang yang berfungsi membeli, mengangkut, dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat.

Masalah-masalah prinsip sudah digariskan dalam al-Qur'an dan dibentangkan dalam al-Hadits. Sedangkan dalam masalah masalah teknis, para mujtahidin telah banyak mencururkan ke ringat ijtihad mereka, beristinbath dalam memecahkan masalah masalah rumit yang dalil-dalilnya tidak tersurat dengan sharih. Sungguh besar jasa mereka, karena para mujtahidin itu telah bekerja keras dalam usaha mereka meninggikan kebenaran syari'at Ilahi. Salah satu masalah muamalat yang belum ada aturan secara rinci adalah Usaha Jasa Ekspedisi akan tetapi secara global termasuk dalam masalah sewa-menyewa. Sedangkan dalam kitab-kitab fiqih usaha jasa ekspedisi termasuk dalam suatu bagian yang disebut ~~Kitab Ijarah~~ atau Bab Ijarah. Bagi an ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sewa-menyewa, yang meliputi : Sewa-menyewa barang yang bergerak, sewa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa menyewa tenaga (perburuhan).

Syari'at Islam membenarkan sewa-menyewa dan perburuhan berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِيتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَةً لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءَ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .

Artinya : " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rab-mu ? Kami telah bagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Rab-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

(Q.S. Az-Zukhruf: 32)

Demikian dalil-dalil tentang sewa-menyewa yang dikaitkan dengan usaha jasa ekspedisi, yang dikarenakan menyangkut kepentingan umum, maka jadilah hukumnya halal menurut syara'.

Hujjah lain yang dikemukakan oleh Ustadz Abdurrahman Isa ialah aturan dasar yang dipegangi oleh golongan Ahlus - Sunnah: "Asal pada sesuatu itu boleh" dan firman Allah Ta'ala : "Dialah yang menjadikan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi....".

Bertitik tolak dari qaidah itu, maka usaha jasa ekspedisi tersebut mubah, karena termasuk mu'amalah manusia yang dijadikan Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak diperoleh nash yang melarang.

Dalil lain yang dikemukakan Ustadz Abdurrahman Isa ialah bahwa agama Islam ditegakkan di atas prinsip kelonggaran dengan menghilangkan kesempitan dan kesulitan, berdasarkan firman Allah :

...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... (البقرة: ١٨٥)

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesukaran.... " (Q.S. al-Baqarah:185)

وجهدوا في الله حق جهاد هو اجنبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
(الحج: ٢٨١)

Artinya: "Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah dengan sebenarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (Q.S.22 al-Haj :78)

Ringkasnya menurut Ustadz Abdurrahman Isa, sesungguhnya usaha jasa ekspedisi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridlakan, merupakan

perbuatan yang melayani umum dengan menghantarkan barang dari suatu tempat ke tempat lain (sampai tempat tujuan), memlihara barang-barang dan menolak resiko kekurangan - kebutuhan suatu barang /makanan dari seorang produsen - ke konsumen (masyarakat), dan sebagainya. Sebaliknya peusahaan jasa ekspedisi memperoleh laba yang memadai, - yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung mashlahat yang berhubungan dengan apa yang dicip takan oleh Allah bagi kepentingan kita, dan bagi manusia perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya baik dari kitab, sunnah maupun Ijma', ju ga tidak mengandung apa yang dilarang oleh syara' berupa pertentangan dan permusuhan. (DR.H.Hamzah Ya'qub,1984:308)

Pengertian usaha jasa ekspedisi

Ekspedisi atau Freight Forwarder adalah Suatu usaha dimana seseorang yang mendapat order dari langganan untuk- pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai pihak yang membawa barang-barang tersebut ketempat tujuan. (DRS. Sukrisman, 1985 : 1).

Ekspedisi atau Pengangkutan menurut arti katanya - dari kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuat an dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tem- pat lain.

Nama lain dari ekspedisi yaitu "Freigh Forwarder" dan punya pengertian : " Seorang yang mendapat order dari langgan untuk pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai pihak yang membawa barang-barang tersebut ke tempat-tujuan."

Freight Forwarder juga melakukan beberapa kegiatan - yang berhubungan dengan pergudangan, pengurusan Bea & Cukai-pemeriksaan atas barang-barang dan melakukan pungutan-pungutan yang diperlukan. (Sukrisman, Drs. 1985)

Untuk mendapatkan pengertian ekspeditur itu, KUHD pasal 86 ayat 1 : Ekspeditur adalah melulu mencarikan pengangkutan terhadap barang-barang bergerak bagi pihak pengirim, - baik mengenai pengangkutan di darat, maupun di perairan termasuk di laut.

Tetapi dalam praktek ekspeditur itu mencarikan pengangkutan terhadap barang-barang yang akan dilaksanakan oleh orang lain (pengangkut), kadang-kadang juga mengadakan pengangkutan sendiri. Mengenai pengusaha pengangkutan, pihak ini membebaskan diri untuk menyelenggarakan seluruh pengangkutan antara tempat permulaan pengiriman sampai ke tempat tujuan, - untuk biaya yang ditetapkan sekaligus. (Sution Usman Adji,SH Djoko Prakoso,SH ; Hari Pramono, 1991).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tadi dapat dinyatakan bahwa pengangkutan itu mengandung kegiatan memuat - barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ke tempat lain, dan menurunkan barang atau penumpang. Dengan demikian, apabila dirumuskan dalam definisi, pengangkutan adalah - proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat permulaan pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. (Abdulkadir Muhammad,SH, 1991 :19).

Baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD (baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/ atau-orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian untuk suatu hal tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan atau-ekspedisi. (Sution Usman Adji,SH ; Djoko Prakoso,SH ; dan-Hari Pramono,1991 : 5).

B. Unsur-unsur di dalam Ijarah yang dikaitkan dengan Usaha - Jasa Ekspedisi.

Bentuk mu'amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya terbatas, misalnya tidak semua orang dapat membeli kendaraan atau mobil karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati angkutan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa di samping mu'amalah jual beli maka mu'amalah sewa-menyewa (ijarah) ini mempunyai peranan dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu-hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitannya timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.

Sedangkan unsur-unsur atau rukun dan syarat-syarat sewa menyewa, dengan memperhatikan sejumlah dalil, maka fuqaha' merumuskan sebagai berikut :

- Dalam perjanjian ijarah menjadi subjek adalah yang menyewakan (mukjir) dan penyewa (mustakjir). Dan yang menjadi obyek adalah manfaat barang sewa yang dinikmati penyewa dan harga-sewa atau upah yang diterima oleh yang menyewakan.

(Ahmad Azhar Basyir, MA, 1987 :27)

Dengan memperhatikan sejumlah dalil, maka fuqaha merumuskan unsur-unsur atau rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab kabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

Adapun syarat-syarat sewa-menyewa (ijarah) meliputi :
Pertama: Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa - menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyis .

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu : kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari yang buruk (mumayyiz).

Kedua : Kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa itu tidak sah, berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء : ٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan bathil , melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kalian. (Q.S.4 anNisa':29)

Ketiga : Obyek sewa-menyewa haruslah jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada mashlahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar.

K

Keempat : Obyek sewa-menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan madzhab Abu Hanifah. Adapun jumhur fuqaha, membenarkan penyewaan barang-barang pengikut, justru menurut mereka, barang-barang itu bermanfaat dan dapat dipisahkan (dibagi) dari induknya, sebagaimana halnya dalam jual beli. Tetapi jika manfaatnya itu kabur, maka sewa-menyewa itu rusak.

Kelima : Barang sewaan haruslah dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas), tanah gersang untuk pertanian, Kendaraan yang rusak dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan dengan bunyi persetujuan (akad), untuk keperluan apa barang itu disewa.

Sungguh pun tidak ada dalil-dalil naqli yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis, berdasarkan kepada kenyataan dalam masyarakat dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan tersebut.

Keenam : Obyek sewa-menyewa itu haruslah barang-barang yang halal, bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Yang haram - misalnya menyewa tukang pukul(algojo) untuk menganiaya seseorang dan lain-lain perbuatan munkar. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan sholat atau shaum, sewa-menyewa macam - ini batal karena ibadah tersebut merupakan fardlu ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain..

Ketujuh : Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas, Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan - terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal - dan sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.

Diantara masalah usaha jasa ekspedisi yang memerlukan - tanggung jawab dan menanggung konsekwensi "pengembalian barang sehingga dimasukkan juga dalam bab "titipan" (Wadi'ah). Titipan ada kaitannya dengan "pertanggungan", jika pihak yang menerima titipan barang dengan sengaja menyelewengkan barang tersebut - sehingga menimbulkan kerugian pihak penitip.

Yang dimaksudkan dengan barang titipan (wadi'ah) ialah suatu barang yang dititipkan sebagai amanah oleh seseorang kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik.

Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip - dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di mustahabkan (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk - menerima titipan itu.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya, berdasarkan firman Allah :

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِي أَوْعَنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... (البقرة ٢٨٣)

Artinya : " Jika seseorang daripada kalian percaya kepada yang lainnya, maka hendaklah orang yang diserahi amanah itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada Allah. (Q.S. Ab-Baqarah : 283)

Didalam usaha jasa ekspedisi terdapat unsur amanah (kepercayaan), karena disini terdapat transaksi antara pemilik barang (order) mempercayakan barangnya kepada pengirim barang dalam hal ini adalah pihak ekspeditur. Sesuai dengan hadits Nabi tentang amanah :

ادالامانة الى من ائتمنتك ولا تخن من خالك (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya : "Tunaikan amanah kepada orang yang beramanah kepada mu, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." (H.R. ABU DAUD dan at-TIRMIZI)

Selain itu untuk menghindari suatu persengketaan, maka setiap transaksi haruslah ditulis dengan baik dan benar, agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman antara pemilik barang dengan pihak pengirim ekspeditur serta tidak terjadi perselisihan diantara mereka dibelakang hari. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واليكيب
بليكم كاتب بالعدل... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S. al.Baqarah, 2 :282)

C. Penyelesaian kasus bila ada yang menyalahi janji di dalam transaksi sewa-menyewa (Ijarah) USAHA JASA EKSPEDISI.

Dalam bermu'amalah acap kali manusia terlibat dalam persengketaan, kesalah pahaman dan lain sebagainya yang dapat mengundang pertengkaran dan perselisihan yang lebih jauh. Tidak-terkecuali dalam dunia usaha jasa ekspedisi atau sewa-menyewa (ijarah). Dimana dalam usaha ini terdapat banyak sekali persyaratan dan perjanjian-perjanjian yang di adakan misalnya tentang pencarteran kendaraan, kombine (penggabungan barang), sistem - pembayaran dan lain sebagainya.

Perselisihan dan pertengkaran itu dapat dibawa ke "meja hijau" (pengadilan) guna mendapatkan keputusan hakim. Tetapi - dapat pula dihentikan melalui jalan yang dibenarkan oleh syari'at yaitu " Shulh ", perdamaian atau persetujuan. Jalan ini - dipandang baik, karena menempatkan kesepakatan di tempat pertengkaran (syiqaq) dan dapat menghilangkan perasaan dendam dan angkara murka diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang menganjurkan perdamaian dan menyatakan baiknya :

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلمكم ترحمون (المحجرات: ١٠)

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang Mu'min itu tidak lain melainkan bersaudara. Lantaran itu damaikanlah antara dua saudara kalian. (Q.S. Al-Hujurat : 10).

... فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ' واخضرت النفس الشيع '...
(النساء: ١٢٨)

Atinya : "Maka tidak mengapa mereka berdua mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. (Q.S. AN-NISA', 4 :128).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. (النساء: ١١٤)

Tid

Artinya : " Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang - yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara-manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian ka-
rena mencari keridloan Allah, maka kelak kami mem-
beri kepadanya pahala yang besar.

(Q.S. AN-NISA' : 114)

Artinya : " ...Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) per-
baikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak
ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan)
Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan ha-
nya kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.S. HUUD :88).

...أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
(الهود: ٨٨)

Meskipun perdamaian itu baik dan dianjurkan melakukan-
nya guna menghilangkan syiqaq (pertengkaran), namun perlu di-
ketahui bahwa segala sesuatunya tidak boleh bertentangan de-
ngan aturan dasar yang telah ada (al-Qur'an dan Hadits Nabi)
tidak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak bo-
leh mengharamkan yang halal.

Demikian juga apabila kedua belah pihak dalam perdamai-
an itu telah sepakat menetapkan syarat-syarat yang dibenarkan
Agama, maka syarat-syarat itu wajib keduanya patuhi.

Demikian ditandaskan oleh Rosulullah saw. yang diterima melalui 'Amr bin Auf al-Muzani :

الصالح جائز بين المسلمين، إلا صلا حرم حلا لا أو احل حراما، والمسلمون
على شروطهم، إلا شرطا حرم حلا لا أو احل حراما. (رواه الترمذی وصححه)

Artinya : " Perdamaian itu halal antara Kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum Muslimin (wajib) berpegang dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menhalalkan yang haram. (H.R. TIRMIDZI dan dishahkan).

B A B III

DESKRIPSI USAHA JASA EKSPEDISI PT. CITRA CIPTA MADINA (PT.CCM) DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Dalam Usaha Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya

PT. Citra Cipta Madina adalah merupakan salah satu unit usaha dalam suatu lingkup Dewan Ekonomi pada Lembaga Yayasan-Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Surabaya. Dan merupakan-Cabang dari Pondok Pesantren Hidayatullah di Balik papan sebagai Pusat Pondok Pesantren tersebut.

Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM berdiri pada tahun 1990 , dengan dilatarbelakangi dengan adanya pengiriman Majalah Suara Hidayatullah (SAHID) ke seluruh cabang-cabang Pondok Pesantren Hidayatullah di Indonesia yang berjumlah \pm 60 cabang.

Hal ini merupakan awal dari pemikiran Dewan Ekonomi untuk mendirikan usaha jasa ekspedisi sekaligus sebagai alat penghantar an dari terbitnya Majalah SAHID setiap bulannya.

Meskipun usaha jasa ekspedisi PT. CCM ini termasuk kategori usaha yang masih muda bila dibandingkan dengan usaha jasa ekspedisi lainnya. Akan tetapi prospek serta perkembangannya - sangat pesat, hal ini dapat dilihat telah berdirinya cabang ekspedisi di kota-kota besar di Jawa dan direncanakan setiap cabang Pondok Pesantren Hidayatullah berdiri pula sebagai cabang ekspedisi PT. CCM.

Usaha Jasa Ekspedisi PT. CCM di kotamadya Surabaya merupakan pusat dari cabang-cabang yang telah didirikan, sekaligus

merupakan usaha jasa ekspedisi yang bergerak khusus pengiriman leawt darat sedangkan ekspedisi lewat udara dan laut PT. Citra Cpta Madina masih sebagai agen saja.

1. Dasar Hukum Usaha Jasa Ekspedisi PT. EOM di Kodya Surabaya

Perjanjian pengangkutan atau ekspedisi merupakan bagian dari sub sistem Hukum Nasional, yaitu hukum keperdataan dagang (perusahaan), yang terdiri dari komponen komponen sub sistem : Subjek hukum, status hukum, peristiwa hukum, objek hukum, hubungan hukum, tujuan hukum,. Komponen-komponen ini dasar deskripsi dan pembahasan perjanjian angkutan atau ekspedisi.

Ada dua klasifikasi undang-undang yang mengatur ekspedisi atau pengangkutan, yaitu undang-undang yang bersifat administratif. Yang menjadi pokok pembahasan disini adalah undang-undang yang mengatur pengangkutan atau ekspedisi ada pula undang-undang biasa, yaitu yang terdapat di luar KUHD dan KUH Perdata Karena ada tiga jenis pengangkutan yang menjadi pokok kajian , maka ada tiga macam pula undang-undang pengangkutan (ekspedisi) dan pembahasannya melalui tiap jenis pengangkutan itu.

1.1. Undang-undang pengangkutan darat

Bab V Buku I bagian 2 dan 3 pasal 90 s.d. 98 KUHD memuat ketentuan mengenai pengangkutan darat. Ketentuan ini bersifat *Lex generalis*, artinya berlaku umum untuk semua jenis pengangkutan darat. Stb. 1927-262 memuat ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan raya. Kedua undang-undang ini bersifat *lex specialis*, artinya hanya berlaku khusus bagi tiap jenis pengangkutan darat yang bersangkutan.

1.2. Undang-undang pengangkutan Laut

Buku II Bab V KUHD tentang perjanjian carter kapal , Buku II Bab V-A KUHD tentang pengangkutan barang. Dua bab ini memuat ketentuan mengenai pengangkutan laut. Apabila diperhatikan, maka undang-undang pengangkutan darat sebagian - terkodifikasi dalam KUHD, sedangkan undang-undang pengangkutan laut semuanya terkodifikasi ke dalam KUHD.

1.3. Undang-undang pengangkutan Udara

Stb. 1939 - 100 tentang ordonansi pengangkutan atau - ekspedisi udara memuat ketentuan mengenai pengangkutan atau ekspedisi udara, tidak terdapat aturan didalam KUHD. Jadi, - tidak terkodifikasi sama sekali. Undang-undang No. 83 Tahun- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 1958 (LN. No.159 Tahun 1958) tentang penerbangan lebih banyak bersifat publik administratif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, warisan pemerintah Hindia Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel V-mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal *vervracting en bevracting van scep*; Titel ke V tentang pengangkutan di darat serta sungai-sungai dan perairan di pedalaman (*rivieren en binnen wateren*) hanya diberikan sedikit peraturannya saja yang terdapat di dalam bagian ke 3 bagian ke 2, Titel ke V , Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B. Unsur-unsur yang terdapat dalam usaha jasa ekspedisi PT.
Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya

1. Ekspediteur (Pengangkut)

Istilah " ekspediteur " atau pengangkut " mempunyai arti : sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkutan dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan. Sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan.

Dalam KUHD tidak ada pengangaturan definisi pengangkutan secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, Pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan.

Pengangkutan adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan yang berbentuk :

- a. Perusahaan persekutuan badan hukum misalnya : PT.Gesuri - Lloyd, PT. Jakarta Lloyd, PT. Pelayaran Nasional (Pelni).
- b. Perusahaan Umum (Perum), misalnya Perum Damri.
- c. Perusahaan Jawatan (Perjan), misalnya PJKA.
- d. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, misalnya: Titipan Kilat, Elteha.
- e. Perusahaan perseorangan , misalnya : Bis malam Putra Remaja, taxi antar kota, mikrolet.

Pengangkutan laut biasa juga disebut perusahaan pelayaran niaga, perusahaan pengangkutan udara biasa juga disebut Perusahaan penerbangan.

Pengangkut yang tak memiliki perusahaan pengangkutan, tetapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerjaan pengangkutan. Pengangkut yang menjalankan pekerjaan pengangkutan hanya terdapat pada pengangkutan darat melalui jalan raya. Ia tidak diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, tetapi harus memperoleh izin operasi (ijin trayek).

2. Pengirim (Consigner, Shipper)

Sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga tidak diatur definisi pengirim secara umum. Tetapi dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris disebut "Consigner" tetapi khususnya untuk pengangkutan laut disebut "Shipper".

Pengirim adalah pemilik barang, atau penjual (eksportir), atau majikan penumpang dalam perjanjian pengangkutan rombongan penumpang (tenaga kerja, olah raga). Pemilik barang dapat berupa manusia pribadi, atau perusahaan perseorangan, atau perusahaan persekutuan badan hukum, dan bukan badan hukum, atau perusahaan umum (Perum). Sedangkan penjual (eksportir) selalu berupa perusahaan persekutuan badan hukum atau bukan badan hukum. Majikan penumpang adalah kepala rombongan atau ketua organisasi tertentu.

3. Muatan barang

33

Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan. Barang diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan. Barang terdiri dari berbagai jenis menurut keperluan atau kegunaannya :

- a. barang sandang misalnya tekstil, sarung, baju dan sebagainya
- b. barang pangan, misalnya beras, gula, buah-buahan dan sebagai
- c. barang perlengkapan rumah tangga, misalnya meubelair, sanitary dan sebagainya.
- d. barang perlengkapan pendidikan misalnya buku, lab
- e. barang cair, misalnya minyak, gas alam
- f. barang industri, misalnya zat kimia, Carbide, semen, besi.
- g. hewan, misalnya sapi potong, sapi ternak, ikan hias.

Secara fisik muatan barang dibagi enam golongan, yaitu

- a. muatan barang biasa, misalnya tekstil, kelontong ;
- b. muatan barang berbahaya, misalnya carbide, bahan racun;
- c. muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawi;
- d. muatan barang berharga, misalnya komputer, emas ;
- e. muatan barang khusus, misalnya ikan dingin, cengkeh, tembakau;
- f. muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah .

Dilihat dari sifat alamiahnya, muatan barang digolongkan;

- a. muatan barang padat, misalnya besi, kayubalok;
- b. muatan barang cair, misalnya minyak ;
- c. muatan barang gas, misalnya elpiji, LNG.

Dilihat dari segi cara penjagaan dan pengurusan (custody and handling), muatan barang digolongkan menjadi tiga golongan:

- muatan barang berbahaya (dangerous cargo) yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, mengandung racun;
- muatan barang dingin atau beku (refrigerated cargo) yang perlu diangkut dengan menggunakan ruangan pendingin, seperti daging/ikan segar, buah-buahan segar, sayur-sayuran, obat-obatan;
- muatan barang panjang atau berat melebihi ukuran tertentu - (long length cargo and heavy lift cargo), panjang tiap potongan (peti, colli) melebihi batas tertentu, atau berat per-potong (peti, colli) melebihi batas tertentu, yang umumnya ditentukan 2 metrik ton.

Dilihat dari jenis muatan barang, maka ada tiga jenisnya yaitu :

- general cargo, yaitu berbagai jenis barang, dibungkus dalam bentuk unit-unit kecil (peti, colli);
- bult cargo, yaitu satu macam barang, tidak dibungkus, dimuat dalam jumlah besar, dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau mobil tanki;
- homogenous cargo, yaitu satu macam barang, dibungkus, dimuat dalam jumlah besar, misalnya pengapalan 5000 zak semen.

Pemuatan barang berbahaya perlu dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Sifat berbahaya itu harus diberitahukan secara rinci kepada pengangkut, sebab pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap akibat kerugian yang ditimbulkannya.

4. Alat Pengangkutan

35

Sebagai pengusaha pengangkutan, pengangkut memiliki alat pengangkutan sendiri, atau menggunakan pengangkutan milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkutan darat adalah kendaraan bermotor yang dijalankan dengan oleh pengemudi (sopir). Alat pengangkutan jalan rel adalah kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkutan laut adalah dengan kapal laut niaga yang dijalankan oleh nakhoda. Alat pengangkutan udara adalah pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Sopir, masinis, nakhoda dan pilot bukan pengangkut, melainkan sebagai buruh pengangkut yang dikuasai oleh hubungan hukum perburuhan bab VII-A KUHPdt. Semua alat pengangkutan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

a. kendaraan bermotor umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendaraan bermotor umum diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1965 (L.N. No.25 Tahun 1965) tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan raya (UULLAJR), Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum untuk pengangkutan orang atau barang di jalan dengan pembayaran. Kendaraan bermotor umum terdiri dari mobil penumpang (taksi), mobil bis, mobil barang (truk).

Menurut ketentuan pasal 11 ULLAJR, setiap kendaraan bermotor umum yang berada di jalan harus diuji. Sebagai bukti pengujian yang berhasil baik, kendaraan bermotor harus dibubuhi tanda uji kendaraan dan diberikan pula surat uji kendaraan yang berlaku diseluruh Indonesia. Pengujian dilakukan oleh instansi y-

yang ditunjuk oleh gubernur / kepala Daerah Tingkat I menurut ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. Instansi yang ditunjuk oleh gubernur itu adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Tujuan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala ialah untuk menjaga agar kendaraan bermotor memenuhi syarat teknis dan tidak membahayakan. Tegasnya, menjaga supaya kendaraan bermotor tetap dalam keadaan "layak jalan".

b. Kapal laut niaga

Kapal laut dan kapal laut niaga diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 310 ayat 1 KUHD, kapal laut adalah kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut, atau yang diperuntukkan buat pelayaran di laut.

Dipergunakan artinya pemanfaatan kapal itu hanya untuk laut, Sedangkan diperuntukkan artinya ketentuan pembuatannya, pendaftarannya, dan penggunaannya untuk di laut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 tentang ijin Pelayaran kapal laut niaga. Dalam peraturan ini kapal laut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu

1. kapal laut biasa, yaitu setiap alat pengangkutan yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk pengangkutan di laut;
2. kapal laut niaga, yaitu setiap kapal laut yang digerakkan secara mekanik dan yang digunakan untuk pengangkutan barang - dan atau penumpang umum dengan pungutan biaya.

Setiap kapal laut niaga harus layak laut. layak laut artinya : mampu berlayar di laut karena memenuhi syarat-syarat berlayar di laut. Syarat-syarat kemampuan berlayar di laut meliputi sya-

rat teknis konstruksi, syarat perlengkapan, dan syarat penggunaan kapal. Tujuan layak laut ialah tercapainya pelaksanaan - pelayaran yang aman dan lancar. Aman karena karena memenuhi - syarat kemampuan berlayar, lancar karena ada bukti sertifikat layak laut.

Badan yang berwenang menentukan layak laut ialah Biro Klasifikasi Kapal Indonesia (BKI) berdasarkan peraturan Pemerintah - No.28 Tahun 1964 jo. Surat keputusan Menteri Perhubungan Laut tanggal 20 September 1964 No.I/17/I. Semua kapal laut Indonesia harus diperiksa oleh BKI dan diberi sertifikat layak laut bagi yang memenuhi syarat. Sertifikat itu didaftarkan dalam - buku daftar (Register). Arti penting sertifikat layak laut - bagi nakhoda ialah mengurangi beban tanggung jawab karena ada jaminan keselamatan kapal. Sedangkan bagi pemilik (pengangkut) ada dasar untuk memperlancar kemungkinan mengasuransikan kapal (casco insurance).

Jenis-jenis Kapal Niaga

Ditinjau dari segi niaga (komersial), ada empat jenis kapal - niaga berdasarkan konstruksi bangunan kapal dan sifat muatan yang diangkut, yakni :

1. Kapal Barang (Cargo Vessel)

Yang dimaksud dengan kapal barang adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkut barang menurut jenisnya. Berdasarkan jenis barang yang diangkut, kapal barang dibedakan lagi menjadi :

- kapal muatan umum (general cargo carrier);
- kapal muatan curah (bulk cargo carrier);
- kapal tanki (tanker)
- kapal pengangkut khusus (special designed ship)

- kapal peti kemas (container cargo ship).

2. Kapal Penumpang (Passanger Vessel)

Yang dimaksud dengan kapal penumpang adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkut penumpang. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak, masing-masing geladak terdiri dari kamar penumpang dalam berbagai kelas, misalnya kapal kambuna, kerinci dan lain-lain.

3. Kapal Barang-Penumpang (cargo-Passanger Vessel)

Yang dimaksud dengan kapal barang-penumpang adalah kapal yang dibangun untuk mengangkut barang dan penumpang bersama-sama. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak untuk barang dan kamar untuk penumpang.

4. Kapal Barang Dengan Akomodasi Penumpang Terbatas

Ini adalah kapal barang biasa, tetapi diijinkan membawa penumpang dalam jumlah terbatas, yaitu maksimum 12 orang, yang ditempatkan dalam kamar, bukan di dek.

c. Pesawat Udara

Pesawat udara diatur dalam undang-undang No.83 Tahun 1958 tentang penerbangan (UUP). Menurut ketentuan pasal 1(b) UUP, pesawat udara ialah tiap alat yang dapat memperoleh gaya angkat dari reaksi udara. Dalam pengangkutan udara, pesawat udara adalah pesawat yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dengan pungutan biaya.

Setiap pesawat udara harus layak udara. Layak udara artinya mampu melakukan penerbangan karena memenuhi syarat-syarat kemampuan terbang. Syarat-syarat kelayakan udara suatu pesawat udara ditetapkan oleh atau atas nama Menteri Perhubungan.

Semua pesawat udara yang memenuhi syarat layak udara di beri sertifikat layak udara. Menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 UUP, pesawat udara yang tidak mempunyai surat tanda kelaikkan - yang sah tidak boleh melakukan penerbangan. Tujuan layak udara ialah keselamatan dan kelancaran penerbangan. Arti pentingnya - ialah jaminan keselamatan penerbangan dan memperlancar kemungki - nan mengasuransikan pesawat udara.

d. Biaya Pengangkutan.

Dalam KUHD tidak diatur rumusan secara umum mengenai bia - ya pengangkutan. Tetapi diliha t dari perjanjian pengangkutan, - biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelengara - an pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau p - penumpang kepada pengangkut. Dalam pengangkutan barang, biaya pe - ngangkutan dapat dibayar lebih dahulu oleh pengirim, atau dibayar kemudian oleh penerima.

Dalam pengangkutan penumpang pasal 533-j KUHD menentukan bahwa biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan termasuk dalam biaya pengangkutan. Dengan demikian, biaya pengangkutan - terdiri dari dua unsur, yaitu pertama kontra prestasi penyeleng - garaan pengangkutan, kedua biaya pemeliharaan yang meliputi ma - kanan dan minuman selama pengangkutan. Menurut pasal 533-i KUHD biaya pengangkutan penumpang harus dibayar lebih dahulu.

C. Pelaksanaan Usaha Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madina di - Kotamadya Surabaya

PT. Citra Cipta Madina adalah nama dari salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan (ekspedisi). Jadi-PT. CCM bukan sekedar menjalankan alat pengangkutan sendiri, tetapi juga berwenang mengadakan pengangkutan dan memikul beban resiko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut.

Adapun persamaan antara PT. CCM sebagai ekspediteur dengan pengusaha angkutan ialah bahwa mereka (keduanya) memberikan perantara dalam hal pengangkutan barang-barang antara pengirim - dan penerima, yaitu meliputi jarak dari tempat keberangkatan hingga sampai tempat tujuan, akan tetapi disini mulai tampak perbedaan dalam fungsinya masing-masing, PT. CCM selaku ekspediteur memberikan pengangkutan bagi pengirim barang, biasanya bertindak atas nama sendiri (ekspediteur), tetapi biasanya tidak mengangkut sendiri, Jadi PT. CCM telah mengadakan perjanjian pengangkutan-antara dia dan pengirim barang. Ia mempertemukan pengirim dengan pengangkut yang ia pilih dengan atau tidak dengan persetujuan pengirim barang. Dalam hal ini biasanya PT. CCM sebagai ekspediteur tidak mengangkut sendiri (dalam pengertian sebagai pihak dalam - perjanjian pengangkutan menghadapi pengirim).

Sama sekali lain halnya dengan pengusaha pengangkutan, Ia hanya mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengirim untuk - sejumlah biaya angkutan sekaligus, hanya ia tidak menjanjikan - bahwa dia sendiri (sebagai pengusaha) akan menyelenggarakan dengan biaya komplit tertentu dan sekaligus, lain tidak dan terutama ia tidak menjanjikan akan mengangkut sendiri.

Mengenai "surat pengangkutan" yang diatur dalam KUHD pasal 90 diterangkan bahwa surat angkutan merupakan perjanjian - antara pengirim / ekspediter dan pengangkut.

Sebetulnya tanpa surat angkutan itu perjanjian, apabila telah tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, sudah ada, sehingga surat angkutan tadi hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan, sekedar pengangkut suka menerima barang untuk diangkut menurut penyebutan dan dengan - syarat-syarat, sebagai tertulis di dalam surat angkutan itu.

Tidak mungkin demikian saja surat angkutan itu, karena hanya ditandatangani oleh pengirim atau ekspediter saja seketika dapat mengikat kepada pengangkut.

Barulah akan mengikat mereka dan dengan demikian akan merupakan surat bukti dari perjanjian pengangkutan, semenjak pengangkut sudah mau menerima barang-barang angkutan dengan penyerahan surat angkutan termaksud.

Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut atau pengirim minta sepucuk tanda penerimaan barang-barang dari pengangkut. Biasanya surat angkutan tersebut - dengan barang-barang tersebut di tempat tujuan diserahkan kepada pihak dialamati (penerima).

Dengan demikian itu pihak penerima barang dapat mencocokkan barang-barang yang dikirim kepadanya itu dengan surat angkutan; siapa pengirimnya, lagi pula tentang syarat-syaratnya pengangkutan, Sehingga pihak dialamati dapat memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pihak dialamati.

Baru dengan diterimanya baik oleh pengangkut itu tentang surat angkutan plus barang-barangnya, surat angkutan itu merupakan alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim, ekspediter dengan pengangkut.

Pengangkut sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan- (cukup dengan lisan) berhak minta pemberian surat angkutan yang dibuat sesuai dengan pasal 90 KUHD. Ia berhak memegang sepucuk-surat itu untuk dapat menyelidiki barang-barang apa saja ia terima untuk pengangkutan dari pihak pengirim atau ekspediter. jika bertambah banyaknya pengangkutan barang-barang, pengangkut, apalagi kalau barang-barangnya (dan biasanya) telah terbungkus-ketika diserahkan. Ini akan sangat menghambat kelancaran lalu lintas pengangkutan. Pengangkut dalam hal ini sebaiknya dengan persetujuan pengirim minta dicatat dalam surat angkutan bahwa ia (pengangkut) sementara hanya dapat mengontrol dari luar saja. Pengirimlah dimana perlu, seharusnya membuktikan bahwa pemberitaannya dalam surat angkutan sudah benar. Surat angkutan tanpa catatan apa-apa dari pihak pengangkut ditunjuk sebagai surat angkutan bersih (schoon vrachtbrief).

Dalam mengisi isian jumlah biaya angkutan dari surat angkutan ini tidak perlu diisi seketika, karena kemungkinan besar masih memerlukan banyak pertimbangan, pengukuran-pengukuran maupun perhitungan pertimbangan-pertimbangan serta penghitungan barang-barang terlebih dahulu oleh pengangkut.

Adapun yang harus diisi adalah sebagai berikut :

- a. nama, berat atau ukuran barang-barang angkutan, merek-merek dan jumlahnya;

- b. nama pihak dialamati (pihak pernerima barang);
- c. nama dan tempat kediaman pengangkut;
- d. jumlah biaya angkutan;
- e. penanggalan surat angkutan ;
- f. penandatanganan pengirim / ekspeditur;
- g. sesuatu yang masih diperjanjikan antara pihak pengirim dan pengangkut misalnya mengenai jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, penggantian kerugian (claim) bila terjadi kerusakan atau kehilangan dan sebagainya.

Sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 90 ayat 2 KUHD PT. CCM selaku ekspeditur dibebani kewajiban mendaftarkan surat - angkutan itu dalam register hariannya. Kekurangan dalam undang - undang ini ialah bahwa pendaftaran itu tidak dibebankan pula - kepada pengangkut sebagai pengusaha.

Sekedar tentang pengisian dalam surat angkutan sesuatu - yang masih diperjanjikan antara kedua belah pihak, kemungkinan - ada bahwa ekspeditur atau pengirim yang telah memilih seorang - pengangkut tertentu, dengan pihak-pihak ini lalu sudah dengan - lisan merundingkan dan menentukan lebih mendalam perihal perjanjian pengangkutan yang bersangkutan dan mengingat akan fungsi - pembuktian dari surat angkutan itu, sudah sewajarnya ketentuan - ketentuan khusus tersebut dimasukkannya juga.

Bahwa pendaftaran tersebut sudah dibebankan kepada ekspeditur - dalam hal ini PT.CCM memang sudah benar, tetapi tidak semua pe - ngirim memakai perantaraan ekspeditur.

Sebagai prestasi balasan haruslah dibayar biaya pengangkutan kepada pengangkut. Karena biasanya pihak pengirim itu adalah lain orang daripada pihak penerima, tergantunglah dari perjanjian antara mereka, siapakah yang harus membayar biaya pengangkutan. Dapat pula diperjanjikan apakah pembayaran biasanya pengangkutan itu sudah harus dibayar ketika mengirimkan barang-barang atau pada saat penerima barang-barang di tempat tujuan oleh penerima. Pada pengangkutan di darat ini tidaklah di dalam Undang-undang didapatkan asas utama dalam 491 KUHD mengenai pengangkutan barang-barang menyeberang laut. Jikalau disini disebutkan bahwa baru sesudah penyerahan barang-barang di tempat tujuan dilakukan, pihak penerima harus membayar biaya tersebut dan lain-lain perongkosan menurut dokumen-dokumen, berdasarkan dimana penerima mendapatkan penyerahan barang-barang - itu (hal ini diatur dalam Titel V bagian ke 3 Buku ke I KUHD) akan tetapi masalah pembayaran biaya tersebut harus dilakukan, tidak diatur. Berdasarkan pasal 94 KUHD, tentang pengangkut diberikan jaminan tentang pembayarannya atau penerimaan itu menjadi perselisihan.

Undang-undang memperkenankan kepada pengangkut untuk membuktikan bahwa kurangnya kesempurnaan prestasi (barang-barang - berkurang pada saat penyerahan) atau prestasinya yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan waktu penyelesaian pengangkutan (beberapa barang ternyata rusak atau cacat - yang terlihat dari luar; terlambat sampainya di tempat tujuan) atau sama sekali tidak berprestasi (semua barangnya lenyap atau lenyap atau rusak, tak dapat dipergunakan sekali) semuanya itu adalah disebabkan :

- a. cacat yang melekat pada barang atau barang-barangnya sendiri
- b. kesalahan dan atau kelalaian sendiri pada pihak pengirim /ekspeditur;
- c. keadaan memaksa (overmach).

Dalam perselisihan yang diajukan dan diperiksa di depan Hakim pihak penerima - penggugat cukup mendalilkan tidak adanya prestasi sama sekali dan sebagainya tersebut dari pihak pengangkut - tergugat dan menuntut penggantian kerugian seperlunya; - penggugat tidak perlu mendalilkan dan membuktikan kesengajaan-atau kelalaian pengangkut (tergugat). Tergugatlah yang harus mulai mengemukakan dan membuktikan hal-hal yang dapat mendisculpir dia, artinya yang dapat menenyapkan culpa dari diri - pribadinya pengusaha-pengangkut itu.

Kesalahan dan atau kelalaian sendiri pada pengirim misalnya peti-peti berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata kurang kokoh; atau peti-peti yang ternyata kurang rapat dan mudah dapat dimasuki air, dan sebagainya.

Jikalau pengangkut dalam perselisihan-perselisihan antaranya dengan penerima atau pengirim , ialah berdasarkan perjanjian pengangkutan, ternyata tidak melaksanakan perjanjian itu - secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan; tidak pula mendisculpir dirinya, maka sudah barang tentu pihak penerima atau pengirim dapat menuntut penggantian kerugian yang diderita, hak menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut tersebut , dan siapa semestinya antara penerima atau pengirim itu harus berakesi, pertam-tama tergantung dari faktor apakah penerima telah - melahirkan kehendaknya untuk menerima barang-barang angkutan,se

hingga barang-barang itu harus diserahkan kepadanya. Apalagi kalau dari awal mula telah ditetapkan bahwa pemerintah akan membayar segala biaya angkutan. Di luar hal-hal ini, pengirimlah yang berhak menuntut penggantian kerugian dimaksud. Umumnya kita dapat menggunakan kriterium : Siapakah antara pengirim atau penerima yang menurut kenyataan menderita kerugian, sebagai akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan (ada barang-barang yang lenyap sebagian atau semuanya; ada merusakkan pada semua barang atau semuanya; sampainya barang-barang terlambat). Karena itu segala sesuatu tergantung dari hubungan intern antara pengirim dan penerima (pihak dialamati). (Sution Usman Adji Djoko Prakoso, SH; Hari Pramono, 1991 ; 12-20)

Lebih jelasnya pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Antara pihak-pihak tercipta hubungan kewajiban dan hak, yang perlu direalisasikan melalui penyelenggaraan pengangkutan.

Penyelenggaraan pengangkutan adalah proses kegiatan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan darat, laut dan udara, penyelenggaraan pengangkutan meliputi empat tahap kegiatan yaitu :

1. Tahap persiapan pengangkutan, yang meliputi penyediaan alat - pengangkutan, penyerahan muatan barang atau penumpang untuk - diangkut, pembuatan dan penyelesaian dokumen pengangkutan.
2. Tahap kegiatan pengangkutan, yang meliputi kegiatan pemindahan muatan barang atau penumpang dengan alat pengangkutan dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang disepakati.
3. Tahap penyerahan muatan barang atau penumpang kepada penerima, atau turunnya penumpang, dan pembayaran biaya pengangkutan

an barang jika belum dibayar oleh pengirim barang.

4. Tahap pemberesan/penyelesaian persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan.

a. Pelaksanaan atau penyelenggaraan Pengangkutan Darat

Berdasarkan persetujuan yang telah dibuat, pengangkut - menyediakan alat pengangkutan dan pengirim serta PT. CCM selaku ekspediter menyerahkan surat muatan serta muatan barang untuk diangkut. Pengangkut atau kuasanya memeriksa muatan barang berdasarkan surat muatan. Jika surat muatan belum dibuat atau menurut kebiasaan tidak diperlukan, kepada pengangkut cukup diberitahukan jenis dan jumlah muatan barang yang diangkut. Kebiasaan dalam pengangkutan darat ialah bahwa muatan barang yang sudah diketahui jenis dan jumlahnya, seperti batu bata, semen, beras yang dikarungi, tidak diperlukan surat muatan karena sudah diketahui jenis dan jumlahnya ketika melakukan pemuatan.

Walaupun tidak ada surat muatan, biasanya muatan barang itu dilengkapi dengan nota pengiriman atau kwitansi pembayaran. Jika pengirim sudah melunasinya, penerima hanya perlu mengetahui jenis dan jumlah barang berdasarkan nota pengiriman atau kwitansi tersebut. Setelah muatan diterima, nota pengiriman / kwitansi itu ditandatangani atau diparaf oleh penerima dalam rangkap dua, satu diterima oleh penerima dan satu ditahan oleh pengangkut sebagai bukti bahwa pengangkutan selesai dilaksanakan. Jika biaya pengangkutan belum dibayar,

maka nota pengiriman atau kwitansi berfungsi sebagai bukti pengangkutan telah selesai dilakukan sekaligus sebagai bukti permintaan atau penagihan biaya pengangkutan.

Setelah muatan barang siap dalam alat pengangkutan(truk atau gerbong kereta api), pengangkut memberangkatkannya dan ia wajib melakukan penjagaan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap muatan barang sampai tiba di tempat tujuan yang disepakati dalam perjanjian. Sering terjadi juga bahwa pengirim ikut dalam pengangkutan itu bersama muatannya. Dalam hal ini pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Baik dalam pengangkutan barang ataupun penumpang, keberangkatan alat pengangkutan ditetapkan berdasarkan jadwal.

Tetapi kenyataannya jadwal tersebut kurang dipatuhi, sehingga menimbulkan kelambatan pengangkutan. Hal ini dianggap sebagai sudah biasa.

Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pengangkutan sering terjadi ketidaktepatan waktu, ketidaksempurnaan, yang merugikan pengirim atau penerima. Pengirim berhak menuntut ganti rugi kepada pengangkut, dengan membuktikan bahwa pengangkut mempunyai itikad buruk (te kwader trouw). Tetapi pengangkut dapat menolak tuntutan tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh :

1. peristiwa yang tak dapat diduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (pasal 1244 KUHPdt) ;
2. atau cacat barang itu sendiri;
3. atau kesalahan atau kealpaan pengirim atau ekspediter (pasal 91 KUHD).

Setelah muatan tiba di tempat (di tempat penerima), pengangkut memberitahukan kepada penerima dan menyerahkan barang itu dengan baik. Setelah dilakukan pemeriksaan, barang itu diterima dengan baik oleh penerima dengan menandatangani atau paraf surat muatan atau nota pengiriman. Jika biaya pengangkutan belum dibayar, maka setelah muatan barang diterima, penerima membayar biaya pengangkutan. Dalam pengangkutan barang ini disebut pengangkutan bayar tujuan.

Dalam hal ini bila timbul kerugian karena terlambat datang, atau karena hilang, atau karena merusakkan, penerima berhak menuntut ganti kerugian kepada pengangkut dalam tenggang waktu satu tahun sejak barang itu seharusnya tiba ditempat tujuan. Tetapi penerima tidak boleh menolak muatan barang yang diserahkan kepadanya itu dan membiarkannya pada pengangkut, kemudian menuntut ganti kerugian untuk seluruh muatan barang. Hal ini di dasarkan pada pasal 1246 s.d. 1248 KUHPdt yang membatasi tanggung jawab pengangkut. Ketentuan ini tidak membolehkan memperkaya diri sendiri tanpa hak. Apabila tuntutan ganti kerugian itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak, penerima dapat membawa perkaranya ke muka Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam kenyataannya, perselisihan mengenai ganti kerugian seperti diatas tadi tidak pernah ada dibawa ke muka Pengadilan Negeri karena jumlah kerugian yang timbul itu masih dalam batas kewajaran yang dapat diselesaikan dengan musyawarah. Disamping itu, pihak-pihak menganut prinsip bahwa penyelesaian masalah kecil tidak perlu menimbulkan kerugian yang lebih besar (biaya dan waktunya) juga lama.

b. Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Pengangkutan Laut.

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak, pengangkut menyediakan kapal laut niaga dan pengirim bersedia menyerahkan barang untuk dimuat dalam kapal tersebut. Sementara proses pemuatan berlangsung, pemeriksaan dan pengecekan jenis dan jumlah barang juga dilakukan oleh pengangkut atau wakilnya. Setelah barang selesai dimuat dalam kapal, pengirim menerima surat tanda terima yang disebut "mate's receipt" dari Mualim I yang mewakili pengangkut. Surat ini merupakan tanda bukti bahwa barang telah dimuat dalam kapal. Kemudian pengirim menukarkan surat ini dengan konosemen yang dibuat oleh pengangkut.

Setelah barang diterima oleh pengangkut, atau selesai pemuatan barang ke dalam kapal, maka sejak itu kewajiban pengangkutan menjaga keselamatan barang tersebut mulai berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 468 ayat 1 KHHD dan pasal 522-ayat 1 KUHD. pasal-pasal ini menerangkan :

" Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahannya. (KUHD pasal 468 ayat 1)".

Sedang dalam pasal 522 KUHD ayat 1 ditentukan :

" Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut mengusahakan keamanan penumpang sejak saat masuk ke kapal sampai keluar dari kapal".

Berdasarkan pasal ini maka jelaslah bahwa proses Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Perjanjian Pengangkutan Laut mulai berjalan sejak barang diterima oleh pengangkut ke dalam kapal. Tetapi keberangkatan kapal diijinkan oleh syahbandar pelabuhan setempat, setelah pengangkut memenuhi semua persyaratan

tan administratif berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara (hukum publik). Dalam hal ini aspek hukum publik mempengaruhi keberlakuan hukum perdata. Dengan kata lain, keberlakuan hukum-publik lebih diutamakan daripada keberlakuan hukum perdata. Bagaimanapun pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan memaksakan keberangkatan kapal sebagai pelaksanaan perjanjian, apabila sya bandar tidak memberi ijin berlayar, perjanjian pengangkutan laut tidak dapat dilaksanakan.

Walaupun pengirim tidak wajib membayar biaya pengangkutan lebih dahulu, kebiasaan yang diikuti adalah bahwa barang di muat dalam kapal, pengirim harus membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut. Dengan diikutinya kebiasaan ini, maka dalam pengangkutan barang, biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu, sebelum keberangkatan kapal.

Memperhatikan ketentuan pasal 468 ayat 1 KUHD, ketentuan pasal ini tidak menjelaskan dimana barang diterima dan dimana diserahkan, apakah di gudang pelabuhan, di dermaga disamping kapal, atau di suatu tempat diluar pelabuhan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, maka dalam pasal tersebut ditentukan :

" Perusahaan pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut barang kepada pemilik barang sejak saat menerima barang dari pengirim sampai saat menyerahkan barang yang diangkutnya kepada penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau syarat-syarat perjanjian pengangkutan atau kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam bidang pelayaran."

Berlainan dengan dua ketentuan pasal di atas tadi adalah ketentuan pasal 1 (Huruf E) The Haque Rules 1924, yaitu konvensi Internasional Tentang Pengangkutan di Laut. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa " Carriage of goods cover the period time when the goods cover are loaded on to the time they are dishcharged- from the ship". Artinya : " Pengangkutan barang meliputi jangka waktu sejak saat barang dimuat ke atas kapal sampai dengan saat barang dibongkar dari kapal". Kata-kata "dimuat diatas kapal" - menunjukkan kepada pelabuhan pemuatan, sedangkan kata-kata di - bongkar dari kapal" menunjuk kepada pelabuhan pembongkaran. de- ngan demikian, tanggung jawab pengangkut berlangsung sejak bar- rang dimuat diatas kapal di pelabuhan pemuatan hingga barang - dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran. Jadi, tempat pe nerimaan dan tempat penyerahan barang lebih jelas dan tegas ji ka dibandingkan dengan ketentuan dua pasal yang dibicarakan se belumnya.

Masalah yang timbul sekarang ialah dimana tempat barang - diterima untuk diangkut dan dimana tempat barang diserahkan ber dasarkan ketentuan pasal 468 ayat 1 KUHD itu ? Hal ini bergan - tung dari apakah perusahaan pengatur muatan (stevedore) itu juga adalah perusahaan (pengangkut) atau berdiri sendiri. Apabila pe- ngatur muatan adalah perusahaan pelayaran juga, maka tempat pene rimaan barang untuk diangkut adalah tempat dimana barang terle- tak atau tersimpan di pelabuhan pemuatan, mungkin di dalam gu- dang pengangkut atau di dermaga disamping kapal. Apabila penga- tur muatan itu perusahaan berdiri sendiri, maka tempat penerima an barang untuk di angkut adalah diatas kapal pengangkut di pe-

labuhan pemuatan (pasal 504 KUHD). Demikian juga tempat penyerahan barang di pelabuhan tujuan (pelabuhan pembongkaran), mungkin di gudang pengangkut, mungkin dermaga di samping kapal, atau mungkin juga di gudang penerima (yang ditunjuk oleh penerima sesuai dengan persefujuan). Hal ini juga diuraikan pada bagian butir terakhirnya pengangkutan.

Selama proses pengangkutan berjalan dan sebelum mencapai tempat tujuan yang ditentukan, muatan tidak dapat diserahkan kepada penerima ditempat pelabuhan tujuan karena beberapa sebab ;

1. jika karena keadaan setempat kapal tidak dapat sepatutnya mencapai tujuan akhir, maka pengangkut wajib atas biaya sendiri - mengusahakan sendiri membawa muatan barang yang diangkut itu - ke tempat tujuan akhir dengan mempergunakan kapal kecil atau - dengan dengan cara lain;
2. jika sudah diperjanjikan bahwa pengangkut tidak perlu mengangkut lebih jauh daripada tempat yang dipandang aman untuk berlabuh maka pengangkut berhak menyerahkan muatan barang itu di tempat yang paling aman dan dekat dengan tempat tujuan yang memenuhi syarat, keamanan tadi, kecuali jika halangan itu bersifat sementara, sehingga halangan itu hanya mengakibatkan kelambatan sebentar saja (pasal 480 KUHD).

Pada saat barang diterima oleh pemegang konosemen, keadaan muatan barang tidak sesuai dengan yang ditulis dalam konosemen. - Hal ini dapat diselesaikan dengan cara :

- Jika pemegang konosemen adalah pengirim sendiri, pengangkutan bebas dari tuntutan, asal keadaan muatan barang pada saat diserahkan kepada pemegang konosemen sama dengan keadaan muatan barang pada saat dimuat dalam kapal (pasal 512).
- Jika

- Jika dalam konosemen ditulis suatu klaussula yang menerangkan bahwa wujud, jumlah, berat, atau ukuran muatan barang yang diangkut tidak dikenal, pengangkut tidak terikat dengan keadaan muatan barang, kecuali jika pengangkut sendiri mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan muatan barang itu atau muatan barang itu telah dihitung, ditimbang, atau diukur di hadapannya (pasal 513 KUHD).
- Jika dalam konosemen sama sekali tidak keadaan muatan barang yang diangkut, pengangkut hanya bertanggung jawab atas keadaan muatan barang itu seperti keadaan pada waktu dimuat dalam kapal sepanjang dapat dilihat dari luar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (514 KUHD).

Setelah muatan barang diterima oleh penerima ditempat tujuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 491 KUHD penerima harus membayar biaya pengangkutan serta segala biaya yang wajib dibayarnya menurut dokumen atas dasar mana muatan barang itu diserahkan kepadanya. Dengan demikian, kewajiban membayar biaya pengangkutan itu timbul setelah muatan barang diterima di tempat tujuan. Jika pembayaran itu dilakukan sebelumnya, itu dianggap sebagai persediaan biaya pengangkutan yang harus diperhitungkan setelah muatan barang diterima oleh penerima di tempat tujuan. Tetapi pengangkut tidak mempunyai hak retensi atas muatan barang, jika ia tidak memperoleh pembayaran biaya pengangkutan dari penerima (pasal 493).

c. Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Angkutan Udara

Apabila setelah terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pengirim barang maupun pengangkut atau ekspediter, maka pengirim barang menyerahkan surat muatan udara bersama-sama dengan muatan barangnya kepada pengangkut, dan pe

angkutan menyediakan ruangan pesawat udara (cargo). Setelah muatan diterima oleh pengangkut, surat muatan udara ditandatangani. Sejak itu muatan barang diterima oleh pengangkut, perjanjian mulai berjalan dan muatan berada dalam penjagaan, pengawasan, dan pemeliharaan pengangkut, baik di bandara, di dalam pesawat udara, maupun di mana saja dalam hal pendaratan di luar suatu bandara (pasal 25 ayat 2 OPU). Pengawasan dan pemeliharaan ini berlaku juga pada penumpang.

Tetapi apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim, karena bukan kesalahan pengangkut, yang dapat dibuktikan, pengangkut berhak menolak tuntutan ganti kerugian yang terjadi tersebut.

Apabila muatan sudah sampai di bandara tujuan, pengangkut berkewajiban memberitahu penerima, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Penerima berhak menuntut penyerahan surat muatan udara dengan muatan barang setelah ia membayar biaya pengangkutan dan memenuhi segala ketentuan dalam surat muatan udara itu. Penerima yang telah menerima bagasi atau muatan barang tanpa protes dianggap telah menerimanya dengan baik.

Dalam hal kerusakan, penerima harus mengajukan protes kepada pengangkut segera setelah kerusakan itu diketahui selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari untuk bagasi dan tujuh hari untuk muatan barang terhitung setelah mulai hari penerimaannya. Dalam hal ada kelambatan, protes harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sesudah hari penyerahan bagasi atau muatan kepada penerima. Protes harus diajukan secara tertulis -

dengan cara membubuhkan catatan di atas surat muatan udara atau dengan membuat surat lain. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan itu tidak diajukan protes, maka hak menuntut terhadap pengugat hapus, kecuali jika ada penipuan oleh pengangkut (pasal 35 - OPU).

Setiap muatan barang baik pada angkutan Darat, Laut maupun Udara sebaiknya diasuransikan pada Perum Asuransi Kerugian - jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo. peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini dengan tujuan apabila kedua belah pihak pengirim barang dan pengangkut mengatasi kerugian apabila sampai terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan, kekurangan dan kehilangan. Dengan asuransi ini pengangkut bebas dari tanggung jawab terhadap penumpang maupun barang muatan, karena tanggung jawab itu telah diambil alih oleh Perum Asuransi - kerugaian Jasa Raharja, sedangkan pengangkut berkewajiban membayar premi asuransi menurut tarif yang telah ditentukan.

(Abdulkadir Muhammad, SH, 1991 : 93-97).

B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA EKSPEDISI PT.CITRA CIP TA MADINA (PT. C C M) DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Islam dari Segi Hukum Dalam Usaha Jasa Ekspedi si PT. Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya .

Dengan meluasnya praktek usaha jasa ekspedisi di seluruh-penjuru dunia termasuk di negeri-negeri Islam, maka sarjana hu - kumIslam (fuqaha) tidaklah berdiam diri dalam mendudukan hukum-nya. Sebagai akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab-kitab fiqih lama, menimbulkan persoalan apakah usaha jasa ekspe- disisi ini dibenarkan atau tidak di dalam hukum Islam.

Aturan-aturan perikatan dalam Islam tidaklah membatasi ma- nusia hanya pada jenis-jenis tertentu yang merupakan akad-akad - yang dikenal pada masa permulaan Islam. Sebaliknya syari'at Islam membukakan pintu bagi manusia dalam berbagai macam perikatan,yang memungkinkan mereka mengenal perikatan baru sesuai dengan panggi- lan kebutuhan zaman. Atau memberi peluang kepada jenis baru, a- sal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang diga- li dari aturan-aturan perikatan umum dalam Islam, misalnya sya - rat-syarat yang diperlukan menurut syara' yaitu saling merelakan dan adanya kemauan bebas pada tempat akad.

Menurut Prof.Musthafa Ahmad Zarqa, Guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria, bahwa"Syari'at Islam - tidaklah membatasi melakukan akad hanya dalam bentuk-bentuk yang dikenal sebelumnya, melainkan hendaknya manusia dapat mencipta - jenis-jenis perikatan baru sesuai dengan panggilan zaman dengan-

memenuhi persyaratan-persyaratan umum yang ditunjukkan syara'. Dan inilah yang tepat dan merupakan dasar kekuatan iradah dalam melakukan perikatan dalam fiqih Islami".

Sedangkan menurut Ustadz Abdurrahman Isa, Maha guru Universitas al-Azhar, beliau menandakan bahwa " Islam meliputi aqidah, ibadah dan mu'amalah. Aqidah Islam terbatas, tidak menerima tambahan dan pengurangan. Demikian juga ibadah terbatas, tidak menerima tambahan dan pengurangan. Adapun mu'amalah yang digariskan dalam Islam, berkaitan dengan tindak-tanduk manusia dalam kehidupannya, yang setiap zaman dan tempat terdapat beraneka ragam mu'amalah dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda".

Ulama terdahulu ternyata tidak menyalahgunakan kemampuan mereka dalam membahas mu'amalah pada zaman mereka dengan jalan penggalan hukum bagi setiap mu'amalah, dimana kitab-kitab fiqih Islam penuh dengan keterangan hukum-hukum ini.

Islam tidak mungkin bingung di hadapan perkembangan baru - antara lain yang menyangkut tindak-tanduk kebendaan dan sistem perekonomian misalnya, usaha jasa ekspedisi salah satu contoh akad perikatan (mu'amalah) modern, apabila ditinjau dari pesatnya perkembangannya.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip fiqih dan nash-nash yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam, maka terdapat qiyas untuk membolehkan "usaha jasa ekspedisi", antara lain "aqad - Ijarah" (perjanjian sewa-menyewa). Demikian juga ditemukan sandaran yang jelas dan dalil yang terang tentang kebolehan usaha jasa ekspedisi dalam hukum Islam (mu'amalah) yang berlaku praktis dalam kehidupan kita yang juga merupakan hukum internasional, lalu

diterapkan dan dimanfaatkan oleh ulama' syari'at Islam di setiap negeri, dan mereka memandang sebagai prinsip yang dlaruri menurut syara' dan harus dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat.

Selain dengan dalil qiyas dan aturan dasar fiqih Islam, - bahwa "segala sesuatu asalnya mubah", juga menandakan urgensi-panggilan zaman yang mendesak perlunya usaha jasa ekspedisi itu. Disebabkan urgensinya di setiap sudut ekonomi yang vital, guna-memperlancar sirkulasi barang kebutuhan masyarakat.

Demikianlah "usaha jasa ekspedisi" karena menyangkut kepentingan umum, maka jadilah hukumnya halal menurut syara', ber tolak dari qaidah di atas, maka pekerjaan usaha jasa ekspedisi-tersebut mubah, karena termasuk mu'amalah manusia yang dijadikan Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak diperoleh - nash yang melarangnya. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة: ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesukaran (al-Qur'an, 2 :185).

Ringkasnya, sesungguhnya usaha jasa ekspedisi dengan nasa bahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling merelakan (meridlakan), merupakan perbuatan yang melayani umum, serta ikut memperlancar sirkulasi kebutuhan pokok masyarakat. Sebaliknya perusahaan jasa ekspedisi memperoleh laba memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Unsur-Unsur yang terdapat dalam Usaha Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madinah di Kodya Surabaya

Secara umum unsur-unsur yang terdapat dalam usaha jasa ekspedisi PT. CCM, tidak terdapat penyimpangan menurut hukum Islam. Akan tetapi secara detail serta kenyataan yang berjalan di dalam praktek pelaksanaan ekspedisi sering ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan syara', yaitu antara lain :

- Tentang Isi surat angkutan

Dalam mengisi isian jumlah biaya angkutan dari surat angkutan ini tidak perlu diisi seketika, karena kemungkinan besar masih memerlukan banyak pertimbangan-pertimbangan serta penghitungan barang-barang lebih dulu oleh pengangkut.

Sekdar tentang pengisian dalam surat angkutan mengenai apa-apa yang selanjutnya masih diperjanjikan antara pihak-pihak. Kemungkinan ada bahwa pengirim yang telah memilih seorang pengangkut tertentu, dengan pihak-pihak ini lalu sudah dengan lisan merundingkan dan menentukan lebih mendalam perihal perjanjian pengangkutan yang bersangkutan dan mengingat akan fungsi pembuktian dari surat angkutan itu, sudah sewajarnya ketentuan-ketentuan khusus tersebut dimasukkannya juga.

Kenyataan di lapangan yang terjadi sering pengirim memberikan data atau surat muatan dengan isian yang sama dengan barang yang akan dikirim lewat ekspediteur. Tetapi setelah terjadi kerusakan pada "Packgaging" atau pembungkusnya, ternyata tidak sesuai antara isi surat pengiriman atau surat jalan dengan barang yang akan dikirim. Kebanyakan hal ini terjadi pada pengiriman barang dalam bentuk paket.

Pemberitahuan tentang data barang dan nilai barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan pengirim sendiri dan juga untuk sekedar meringankan resiko bagi pengangkut dengan cara yang adil. Sebab ialah, apabila data dan nilai barang yang akan dikirim tidak diketahui oleh oleh pengangkut, ia juga dibebani dengan resiko yang tak dapat diperkirakan lebih dahulu sampai dimana ke-lulusannya dan mungkin besar sekali. Dengan diberitahukan nilai dan data barang tersebut, bagi pengangkut lalu sudah ada sekedar gambaran perihal ke-lulusannya resiko yang ia harus hadapi.

Melihat kenyataan yang terjadi seperti tersebut di atas,- Maka tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Khususnya dalam ketentuan unsur-unsur yang terdapat pada aqad Ijarah - salah satunya adalah unsur ijab kabul yang telah disetujui, antara kedua belah pihak. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan usaha jasa ekspedisi yakni pengiriman barang tidak sesuai dengan data atau nilai yang disepakati bersama hukumnya fasad atau rusak. Karena bukan saja merugikan bagi pihak pengirim (ekspediteur) melainkan juga dilihat dari kemanfaatannya, hanya dirasakan oleh pihak pengirim barang saja. Padahal al-Qur'an telah menegaskan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian". (al-Qur'an.4 : 29)..

Selain peristiwa tersebut di atas yang terjadi, penulis juga melihat penyimpangan dalam bentuk lain, dimana hal ini terjadi seakan-akan sudah menjadi suatu kebiasaan. Yaitu masalah sistem-pecarteran armada khususnya dalam pengangkutan darat dan sistem-Kombine (penggabungan barang) dalam satu armada (kendaraan) yang dipakai. Kedua hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, dari pihak pengangkut (ekspediter). Kecuali apabila yang dilakukan oleh pihak pengangkut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pengirim barang sehingga apabila terjadi sesuatu, maka pengirim barang tidak melakukan complaint yang berlebihan. Salah satu hal yang sering terjadi apabila pengangkutan barang dengan sistem pecarteran dan sistem kombine yang dilakukan oleh pengangkut atau ekspediter adalah keterlambatan waktu yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyimpangan sistem pencarteran yang kami maksud adalah seorang pengangkut atau ekspediter yang mendapatkan order dengan transaksi carter sebuah armada (kendaraan), maka pengangkut atau ekspediter telah menyiapkan armada (kendaraan) sesuai dengan permintaan seorang shipper (pengirim barang). Akan tetapi setelah barang sudah masuk kedalam armada pengangkut (truk) kebiasaan terjadi ialah muatan yang ada didalam truk tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga terdapat ruangan untuk dimasuki dengan barang lain yang kebetulan satu tujuan dengan barang yang diangkut dengan sistem carter tersebut.

Meskipun nanti tidak ada suatu kejadian yang merugikan pengirim barang setelah barang tersebut diterima oleh penerima barang. Apabila dilihat dari kaca mata hukum Islam proses pengiriman barang seperti di atas tidaklah sesuai dengan kode etik dagang

yang telah digariskan oleh ketentuan syara' yang berlaku dalam masyarakat luas(khususnya umat Islam). Yang seharusnya menjunjung-tinggi ~~a~~khlaq yang mulia di dalam melakukan mu'malah.

C. Tinjauan Hukum Islam dari segi Pelaksanaan Usaha Jasa Ekspedisi
PT. Citra Cipta Madina (PT. CCM) di Kotamadya Surabaya

Peristiwa perjanjian pengangkutan dapat terjadi karena suatu kejadian, perbuatan dan keadaan. Apabila peristiwa itu diatur - dan diberi akibat oleh hukum ia disebut " peristiwa hukum ". Peristiwa hukum pengangkutan yang dibicarakan di sini meliputi serangkaian perbuatan hukum mengenai cara pelaksanaan dan saat terjadi - penerbitan dokumen perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Cara pelaksanaan serta terjadinya perjanjian pengangkutan , hal ini menunjuk pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan ini tidak ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan ada dalam kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan. Karena itu, serangkaian perbuatan tersebut perlu ditelusuri melalui kasus perjanjian pengangkutan.

Cara terjadi pengangkutan baik pada pelaksanaan maupun perjanjian, dapat secara langsung antara pihak-pihak , atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspediteur). Apabila dilakukan secara langsung , maka penawaran pihak pengangkut dilakukan secara langsung menghubungi pihak pengirim barang. Jika penawaran pihak pengangkut dilakukan melalui media massa, pengangkut hanya menunggu permintaan dari pihak pengirim barang, pada - pengangkutan darat, pengangkut melakukan penawaran melalui iklan-- koran, radio swasta, niaga, pengumuman di depan kantor, brosur, sehingga pengirim dan pengangkut dapat memesan untuk kepentingan pengiriman dan pemberangkatan barang.

Setelah terjadi suatu kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak (pengirim, ekspediter dan atau penerima) maka dalam hal selanjutnya dilakukan pengambilan barang serta pemuatannya ke dalam alat pengangkut (truk, kapal atau pesawat). Apabila pemuatan telah selesai, maka tanggung jawab atas barang yang diangkut atau dikirim menjadi beralih ke pihak pengangkut sepenuhnya.

Apabila terjadi kelambatan dalam penyampaian barang oleh pengangkut, maka dalam hal ini pasal 477 KUHD mewajibkan si pengangkut memberi ganti kerugian karena disebabkan si pengangkut tidak menyerahkan barangnya pada hari yang telah ditentukan atau karena lambatnya dalam menyerahkan barang. Kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa sepantasnya dapat dianggap tidak mungkin bisa menghindarkan kelambatan itu, baik disebabkan oleh kerusakan pada mesin, force majeure (kecelakaan), atau kemacetan lalu lintas (via darat). Cara menentukan ganti rugi dimuat dalam pasal 472 dan 473 KUHD yang merupakan lex-Specialis terhadap pasal 1246 KUH Perdata.

Pelaksanaan usaha jasa ekspedisi PT. CCM di kotamadya - Surabaya dan pada perusahaan jasa ekspedisi lainnya, tersebut diatas jika disimpulkan bahwa perjanjian pelaksanaan pengangkutan ini adalah terdiri dari dua segi yaitu adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut dan adanya pihak pengirim barang untuk diangkut atau disuruh mengangkut dari suatu tempat ke tempat lain (tujuan).

Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang ada serta mengatur tentang pertanggungjawaban dalam perjanjian pengangkutan ini adalah sesuai dengan kehendak Hukum Islam sebagaimana disebutkan diatas.

Dan kepada kaum muslimin merupakan kewajiban untuk melaksanakannya, sebab didalam syari'at Islam diperintahkan sesuai dengan firman Allah yang maksudnya " ikutlah perintah - Allah, ikutlah perintah Rosul dan ikutilah pemimpin-pemimpinmu (pemimpin yang dimaksud disini adalah termasuk penyelenggara kepentingan umum atau masyarakat atau pemerintah).

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Setelah penulis menelaah berbagai persoalan yang menyangkut Usaha Jasa Ekspedisi PT.Citra Cipta Madina di Kotamadya Surabaya ditinjau dari segi Hukum Islam maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Citra Cipta Madina adalah salah satu unit usaha dibawah pengawasan Dewan Ekonomi milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah di kotamadya Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha jasa ekspedisi khusus via darat sedangkan via laut dan udara masih mengageni. Usaha jasa ekspedisi tersebut diatas mempunyai peran yang sangat vital sebagai arsitek - transportasi serta memperlancar sirkulasi barang-barang ke kebutuhan perorangan, rumah tangga maupun perusahaan atau masyarakat pada umumnya.
2. Unsur-unsur yang sangat urgent dalam usaha jasa ekspedisi adalah sebagai berikut :
 - Ekspediteur dalam perjanjian ijarah sebagai Subjek (Mukjir)
 - Konsumen/penyewa dalam ijarah disebut (Mustakjir)
 - Alat transportasi/muatan merupakan objek manfaat barang - yang disewa serta harga sewa / upah juga sudah ada dan ditentukan dalam perjanjian ekspedisi.
3. Usaha Jasa Ekspedisi PT. Citra Cipta Madina ditinjau dari-segi hukum Islam praktek atau pelaksanaannya tidak ada penyimpangan dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis - Besar Haluan Negara (GBHN), khusus mengenai pembangunan hukum ditentukan bahwa dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembangunan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang - bidang hukum tertentu khususnya pembangunan hukum pengangkutan (ekspedisi atau freight forwarder), untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan - dinamika perkembangan dalam masyarakat.
2. Didalam praktek Usaha Jasa Ekspedisi perlu dan penting sekali ketinggian akhlak dan kejujuran baik dari pihak ekspediteur, pengangkut maupun pengirim barang. bila melakukan perjanjian pengangkutan. Sehingga tidak perlu terjadi perselisihan serta turut memperlancar sirkulasi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Pengangkutan darat, laut dan udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. I, 1991.

Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. I, 1990.

Abdoerraoef, Alqur'an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Achyar Ibn Muhajir, Kamus Tigh Plus, Indah, Surabaya, cet. I, 1994.

Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Al Ma'arif, Bandung, cet. II, 1987.

Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), Alih bahasa Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

A.Hasan, Tarjamah Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, cet. XIV, 1988.

Chairuman Pasaribu, Drs, H. Suhrawardi K. Lubis, SH. Hukum - Perjanjian Dalam Islam, Sinar grafika, Jakarta, cet I, 1994.

Djoko Prakoso, SH, Sution Usman Adji, SH, Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, cet. II, 1991.

Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemah, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al qur'an Dept. Agama RI, Jakarta, Pelita-III/ Tahun IV / 1982 / 1983.

H.M.N. Purwosutjipto, SH. Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 5 (Hukum pelayaran laut dan perairan darat), Djambatan, Jakarta, cet. III, 1989.

H.M.N. Purwosutjipto, SH. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 3 (Hukum Pelayaran), Djambatan, Jakarta, cet. IV, 1991.

Hamzah Ya'qub, DR, H. Kode Etik Dagang menurut Islam, Diponegoro, Bandung, cet. I, 1984.

Iman Soepomo, Prof, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, cet. I, 1994.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih bahasa Farid Ma'ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1969.

Muhammad bin Ali as-Syaukani, Naylul Authar, Musthafa Babil Halbi, Bimishra

Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, Subulussalam, Dahlan, Bandung,

Muhammad Yusuf al Qardlawi, Al Halal Wal Haram Fil Islam, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 1976.

Muhammad Thalib, Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi, - PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1977.

R. Subekti, Prof, SH. R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. XXII, 1994.

R. Soeroso, SH. Perbandingan Hukum Perdata, Sinar grafika, Jakarta, cet. I, 1994.

R. Subekti, Prof, SH. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata In -
TERNASIONAL, Bale, Bandung, cet. VI, 1986.

R. Wirjono Prodjodikoro, Prof, DR, SH, Asas-asas Hukum Perda
TA Internasional, Bale , Bandung, cet. VI, 1986.

Sukrisman, Drs, Ekspedisi Muatan, (Freight Forwarder), Alumni
Bandung, cet. I, 1985.

Subekti, Prof, SH. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Ja
karta, cet. XX, 1985.

T.M. Hasbi Ash shiddieqy, Prof, DR. Pengantar Fiqh Mu'amalah,
Bulan Bintang, Jakarta, cet. ke 2, 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
T.M. Hasbi Ash shiddiqie, Prof, DR. Koleksi Hadits-Hadits Hu
kum, Al-Ma'arif, Bandung, 1970.